

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ali. 2014. *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta : Prenada Media Group
- Arikunto, Suharsimo. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Asshiddiie, Jimly. 2007. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Aziz, Abdul. 2011. *Pengantar Etika*. Bandung : Mutiara Ilmu.
- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta : Rajawali Press
- Danusaputro, Munadjat. 1977. *Le Conseil d'Etat Dalam Tinjauan Peradilan Administrasi Negara RI*. Bandung : Binacipta
- DKPP. 2020. Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara

- Hooijdonk, Marieke van dan Peter Eijssvoegel. 2012. *Litigation in the Netherlands, Civil Procedure, Arbitration and Administrative Litigation*. Neterland : Wolters Kluwer
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Publsihing
- Marwoyah, Siti. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Madura : UTM Press.
- Putri, Dwi. 2011. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Gramata Publishing
- Rahim, Abd. 2017. *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum*. Jogja : Universitas Islam Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya : Kencana
- Triwulan, Titik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Media Group

Jurnal

Febriani, Riski. 2015. "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia".

Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6. No. 1

Elly, Cora. 2013. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*. Vol.

10. No. 2

Rajab, Achmadudin. 2021. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam

Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum". *Jurnal USM*

Law Reviwe. Vol. 4. No. 1

Prof. Muhammad. 2020. "Peran Kelembagaan Etik DKPP Dalam Mewujudkan

Pemilu Demokratis". *Jurnal Bawaslu Provinsi Riau*. Vol. 2. No. 2

Dani, Umar. 2018. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di

Indonesia : Sistem Unity Of Jurisdiction atau Duality Of Jurisdiction?

Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristik". *Jurnal Hukum dan*

Peradilan. Vol. 7. No. 3

Muchtar, Henni. *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah*

Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Humanis, Vol. 14

Rustamana, Agus. Dkk. 2023. Perkembangan Pemilu Di Indonesia. *jurnal Sejarah*

dan Pengajaran. Vol. 2 No. 2 Desember.

Romli, Lili. 2011. Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia.

Jurnal Politica. Vol 2. No. 2 November

Chakim, Lutfi. 2014. Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*. Vol 11. No 2. hlm. 402

Nur, Muhammad. 2022. Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Vol. 4 No. 1

Aspan, Zulkifli dan Wiwin Suwandi. 2022. Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal APHTN-HAN*. Vol. 1. No 1

Rajab, Achmadudin. 2021. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*. Vol 4 No 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/2010

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 41-PKE-DKPP/III/2019

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82//G/2020/PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/2019/PTUN-JKT

Artikel

Mkri.id. 2012. Mahfud MD : Demokrasi saat ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk elit, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7664>. diakses pada 9 Januari 2023

Umar, Nur. 2023. *Sejarah Pemilu di Indonesia, Dimulai Sejak 1955*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6989376/sejarah-pemilu-di-indonesia-dimulai-sejak-1955>. di akses pada 9 Januari 2023

Putranto, Aryo. 2022. *Hasil Pemilu 1955, Sejarah Hingga Perolehan Suara Partai Politik*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/18010091/hasil-pemilu-1955-sejarah-hingga-perolehan-suara-partai-politik?page=all>. diakses pada 9 Januari 2023

Verelladevana dan Nibras. 2021. *Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong*, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/27/170407679/dewan-perwakilan-rakyat-gotong-royong-dpr-gr?page=all>, diakses pada 10 Desember 2023

Dkpp.go.id. 2017. “Sejarah DKPP”. <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/#:~:text=Sejarah%20Dewan%20Kehormatan%20Penyelenggara%20Pemilu,dan%20Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Deraah>. diakses pada 11 Desember 2023

Yasin, Muhammad. 2013. “Masalah Eksekusi Paksa Putusan PTUN.” [Masalah Eksekusi Paksa Putusan PTUN \(hukumonline.com\)](#). diakses pada 14 Desember 2023

Hukum Online. 2024. *Syarat Pemilih dalam Pemillu Menurut Undang-Undang*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-pemilih-dalam-pemilu-1t65ae134e2aa58/>. diakses pada 21 Februari 2024